

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan PBJP merupakan kegiatan yang penting dalam penyelenggaraan negara. Hal ini dikarenakan untuk menciptakan pemerintahan yang optimal, dalam hal pelaksanaan tugasnya, pemerintah perlu didukung dengan pengadaan barang maupun jasa melalui belanja. Pelaksanaan belanja dilakukan dalam rangka menggunakan dana yang didapat untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat mendukung kinerja pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pelaksanaan PBJP yang baik maka dapat menunjang terlaksananya pembangunan nasional dengan meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian nasional.

PBJP juga dilakukan demi terwujudnya pemerataan ekonomi di setiap daerah di Indonesia serta memberikan kesempatan berusaha yang lebih luas bagi masyarakat dengan ditanggungjawab oleh pemerintah. Perluasan kesempatan berusaha diharapkan dapat meningkatkan peran serta UMKM maupun Koperasi dan penggunaan produk dalam negeri karena PBJP harus mengutamakan produk-produk lokal Indonesia. Tentunya hal ini dapat dicapai jika pelaksanaan PBJP menggunakan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Barang/Jasa yang diadakan harus

dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki kualitas yang baik dan memberi manfaat yang memadai.

Seiring dengan perkembangan dalam hal pengadaan barang dan jasa, pemerintah menetapkan peraturan terbaru mengenai regulasi PBJP. Pembaharuan ini dilakukan untuk menyesuaikan proses bisnis penggunaan produk atau jasa dari UMKM dan Koperasi serta pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang dananya berasal dari APBN/APBD untuk kemudahan berusaha, juga penyesuaian pada ketentuan sumber daya manusia dalam PBJP. Dalam pelaksanaannya, PBJP haruslah berpegang pada kebijakan, prinsip dan etika PBJP untuk mencapai tujuan pengadaan itu sendiri tanpa kecurangan dan kesalahan.

Karya Tulis Tugas Akhir ini membahas pengadaan yang dilaksanakan oleh salah satu Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang selanjutnya disebut dengan Pemkab Tapanuli Utara, tepatnya pada Dinas Pertanian Pemkab Tapanuli Utara. Dalam Pasal 1 (satu) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kabupaten Tapanuli Utara sendiri memiliki sumber daya yang didominasi oleh sektor pertanian, untuk itu pemerintah perlu memberi perhatian lebih melalui Dinas Pertanian. Karena hal ini, dapat kita lihat bahwa Dinas Pertanian Pemkab Tapanuli Utara memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang lebih maju. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Pertanian perlu melaksanakan PBJP sesuai dengan peraturan dan etika yang ada. Salah satu

pengadaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pemkab Tapanuli Utara adalah Pengadaan Traktor Besar yang bernilai Rp. 900.000.000,00 pada Oktober 2021, di mana pengadaan ini bertujuan untuk membantu pengolahan lahan pertanian oleh petani yang membutuhkan. Pengadaan Traktor Besar ini sendiri dilaksanakan dengan cara Tender Cepat dan dilakukan dalam pengadaan yang spesifikasi serta volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci atau dimungkinkan untuk dapat menyebutkan merk untuk barang berupa suku cadang atau bagian dari satu sistem yang sudah ada.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meninjau pengadaan traktor besar oleh Dinas Pertanian Pemkab Tapanuli Utara pada tahun anggaran 2021 untuk melihat kesesuaian pelaksanaannya dengan kebijakan pengadaan terbaru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Kajian ini berfokus pada seluruh tahapan PBJP yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan traktor besar dengan metode tender cepat, termasuk terkait pengenaan pajak pada pengadaan ini. Kemudian penulis juga menguraikan permasalahan dan kendala yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan pengadaan ini. Seluruh hasil penelitian dan analisis Penulis mengenai kajian pengadaan ini dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “KAJIAN TERHADAP PROSES PENGADAAN TRAKTOR BESAR PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian dari seluruh tahapan pengadaan Traktor Besar oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dengan peraturan yang berlaku?
2. Apakah kendala maupun permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian Pemkab Tapanuli Utara dalam pengadaan Traktor Besar?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui seluruh proses pengadaan traktor besar oleh Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 mulai dari proses perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan dan penyelesaiannya.
2. Mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi pada proses pengadaan traktor besar oleh Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Secara umum, dalam penulisan karya tulis ini penulis berfokus untuk membahas keseluruhan proses pengadaan traktor besar oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun anggaran 2021. Dari segi pembahasan, penulis memaparkan mengenai mekanisme pengadaan traktor besar menggunakan metode tender cepat yang dimulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, hingga pelaksanaan dan penyelesaian pengadaan, serta memberikan kajian mengenai kesesuaian praktiknya terhadap peraturan yang berlaku pada tahun

anggaran pengadaan ini dilaksanakan. Pada tahap pelaksanaan pengadaan, penulis menguraikan kewajiban perpajakan dalam pengadaan Traktor Besar. Selain itu, penulis juga meneliti permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengadaan ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Melalui penelitian dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan baru terkait proses serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan diharapkan dapat dijadikan bahan pembelajaran maupun bahan literasi bagi pembaca Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA). Selain itu, hasil yang didapatkan dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan contoh nyata dari praktik yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang sejenis.

Bagi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah ke depannya, serta dapat memberikan manfaat secara tidak langsung kepada negara berupa bahan untuk pengembangan kebijakan pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum dari karya tulis tugas akhir yang direncanakan disusun. Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang penulisan,

rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang dibuat dalam menulis karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diungkapkan teori-teori berupa dasar hukum dan konsep yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terutama teori terkait pengadaan barang dengan menggunakan sistem tender cepat mulai dari perencanaan sampai dengan penyelesaiannya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan metode-metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dan melakukan penelitian terkait objek yang penulis bahas. Selain itu, di bab ini mengungkapkan secara rinci objek dari Karya Tulis Tugas Akhir. Pada bab ini juga dilakukan perbandingan antara teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya dengan praktik yang terjadi pada pengadaan Traktor Besar oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini dijelaskan tentang simpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan beberapa saran yang dapat bermanfaat untuk ke depannya.